BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 25 Juni 2025

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-2838/BAPP/065.11/06/2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya meningkatkan kualitas serta menjaga ketetapan waktu dalam proses penyusunan Renstra PD, maka seluruh Kepala Perangkat Daerah agar segera menyusun Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dalam surat edaran ini. Dokumen Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah paling lambat disampaikan ke Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 17 Juli tahun 2025.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Renstra-PD) Tahun 2025-2029.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

dr. AREIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Tembusan :
1. Arsip;

SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-2838/BAPP/065.11/06/2025
Tanggal : 25 Juni 2025
Tentang : Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. PENDAHULUAN

Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD, didasari atas Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah.

II. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA-PD

Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

A. Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD meliputi :
   1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
   2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
   3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
   4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan
   5. SIPD.

B. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD sekurang-kurangnya memuat sistematika sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN;

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penyusunan

BAB II, GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

Subbab Gambaran Pelayanan PD paling sedikit memuat :

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
2. Sumber daya Perangkat Daerah;
3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan

4. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan :

dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan(apabila ada);
b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada);
c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :

1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
2. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

C. Tata Cara Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 :

BAB I PENDAHULUAN

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025- 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Subbab Gambaran Pelayanan PD :

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *).....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Ket :
1) Kolom (6) sampai dengan kolom (20) diisikan data tahun 2025 s.d. 2029 (Target, Realisasi dan Rasio Capaian)

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan sebelumnya.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah* .....
Provisi/Kabupaten/Kota .....

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah
**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah (Per Program)

Realisasi Anggaran tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terhadap Rencana APBD.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
2. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data- data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
3. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD
4. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari :
   a. permasalahan;
   b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
   c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
   a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
   b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
   a. kalimat kondisi;
   b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
   c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
   d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

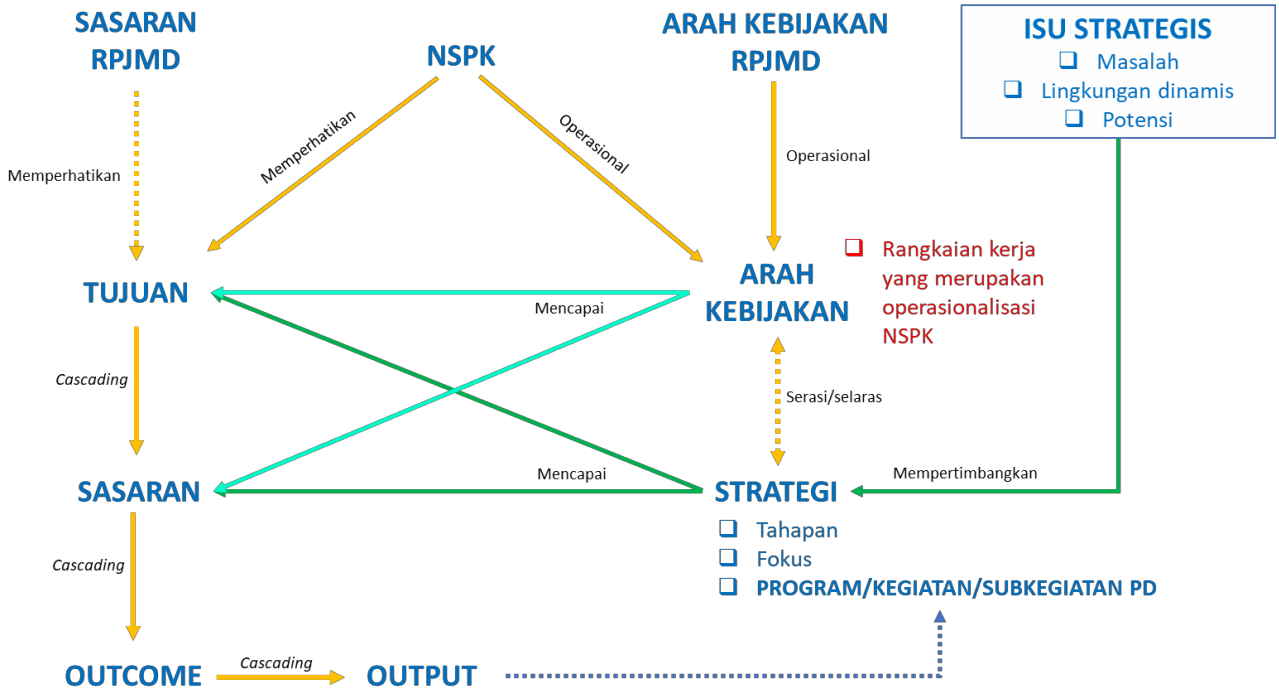

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

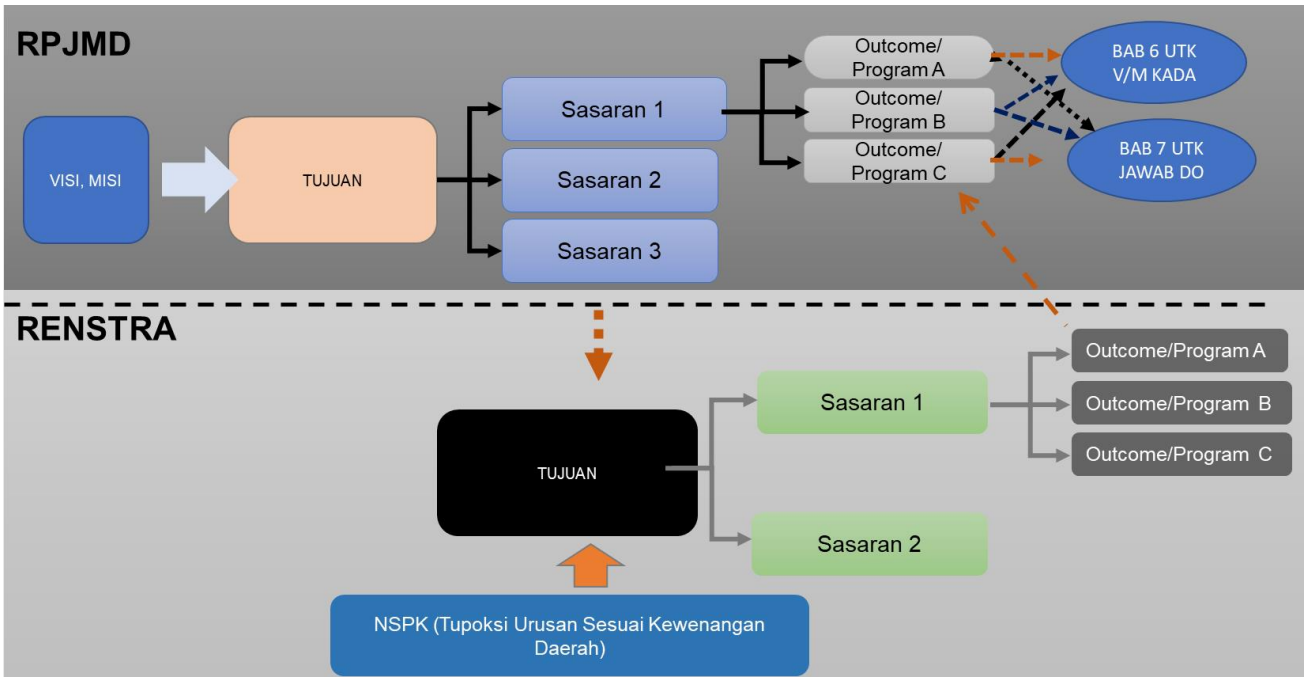

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	T1		T1								
		S1.1	S1.1								
		S1.2	S1.2								

Ket :

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 Ket:

1. Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline
2. (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline

5. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	**TAHAP II (2027)**	**TAHAP III (2028)**	**TAHAP IV (2029)**	**TAHAP V (2030)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
8. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
9. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	**OPERASIONALISASI NSPK**	**ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD**	**ARAH KEBIJAKAN PJMD**	**KET.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

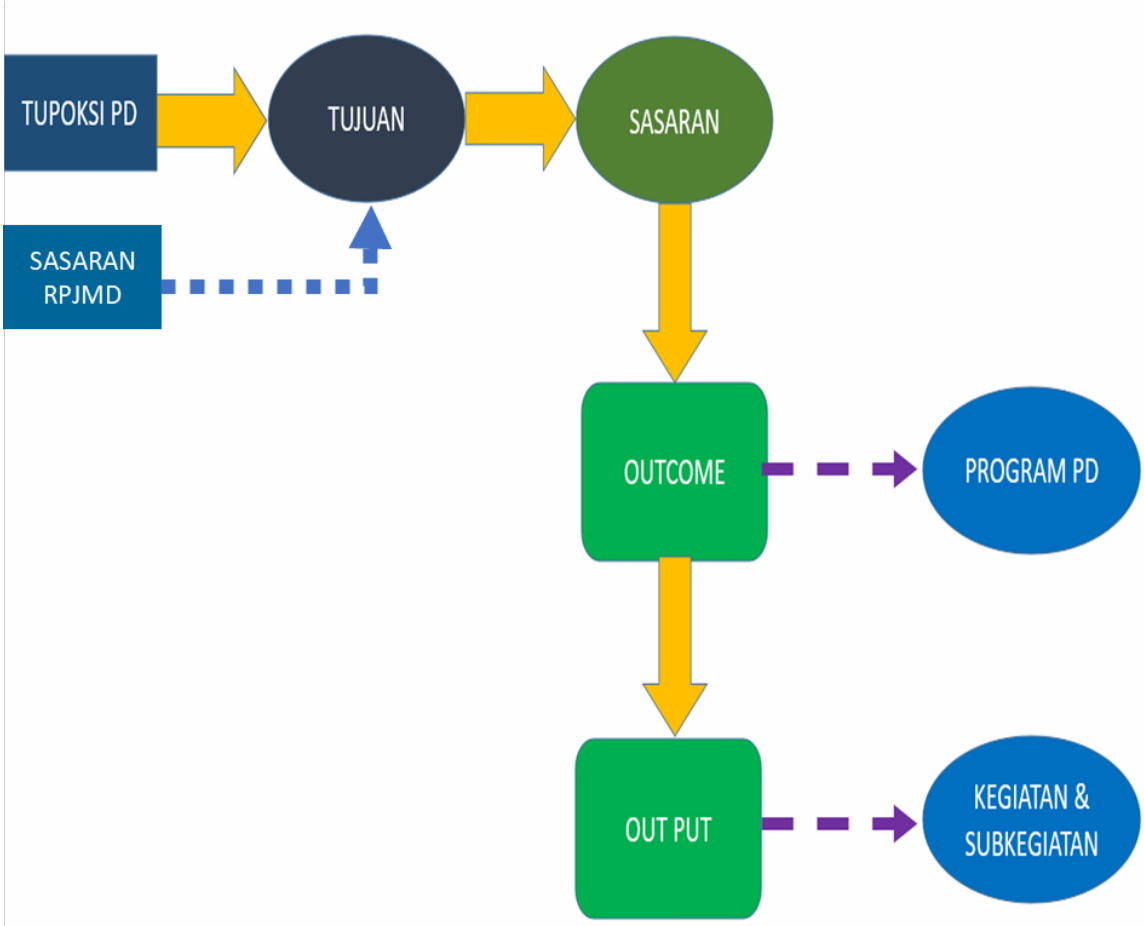

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1				T1		
		S1.1			S1.1		
			OC1.1.1		OC1.1.1	PROG. 1	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	KEG. 1.1	
						SUBKEG. 1.1.1	
						SUBKEG. 1.1.2	
				OT1.1.1.2	OT1.1.1.2		
			0C1.1.2		0C1.1.2	PROG. 2	
				OT1.1.2.1	OT1.1.2.1		
				0T1.1.2.2	0T1.1.2.2		
		S1.2					
			O1.2.1				
			O1.2.2				

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(1

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

BAB V PENUTUP

D. Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029

APIP daerah melakukan reviu terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029. Subtansi Reviu APIP atas Rankhir Renstra PD Tahun 2025- 2029 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
2. keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi Perangkat Daerah pemangku urusan);
3. konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, dan subkegiatan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029;
4. ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya.

E. Penyelarasan Renstra PD terhadap RPJMN Tahun 2025-2029

Tim Penyusun RPJMD melakukan penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain :

a. Periodesasi;
b. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
c. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
d. Kinerja tujuan, sasaran, dan outcome serta indikator Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk mendukung RPJMN Tahun 2025-2029; dan
e. Indikator kinerja urusan yang bersifat konkuren beserta targetnya sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau NSPK yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga.

F. Kinerja Renstra PD Per Urusan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Daerah kewenangan provinsi memiliki tujuan dan outcome yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing.

Lampiran :

1. Cascading RPJMD-RENSTRA 2025-2029
   Link download bahan :
   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wlftWxDsfn4hxVLkChZ9jg32Wo4_vNUdvrcORLKEgaU/edit?usp=sharing

2. Indikator Program Inmendagri No. tahun 2025 :
   Link download bahan :
   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1No2hHQvd7SoaZC5yv4CM3YArjibQNjiqoj9cUZbmCzg/edit?hl=id&pli=1&gid=0#gid=0

Misi	Arah Kebijakan	Strategi	Tema RPJPD Tahap I					Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Proyek Strategis 1	Proyek Strategis 2
			Tema Tahun 2026	Tema Tahun 2027	Tema Tahun 2028	Tema Tahun 2029	Tema Tahun 2030			
			Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan	Akselerasi Pembangunan SDM dan Peningkatan Efektivitas Perlindungan Sosial	Pengembangan Ekonomi Sektor Unggulan Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata	Pemantapan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pendapatan Masyarakat Berkualitas	Perwujudan Kukar yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan			
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan penanaman modal dalam pembangunan perekonomian daerah baik ekonomi kerakyatan maupun perekonomian berbasis kawasan	1	1				Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera	
	Peningkatan aktivitas koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
	Peningkatan promosi dan pengembangan iklim penanaman modal							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	Pengembangan industri kepariwisataan berbasis alam, sejarah dan budaya serta akselerasi pembangunan ekonomi kreatif daerah	Pengembangan hilirisasi dan pariwisata sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif			1	1	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah	Program Stimulus Komunitas Kreatif
	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan serta pemenuhan sarana prasarana pertanian yang memadai							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik
	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda							Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik	
	Hilirisasi produk pertanian dan pengembangan sektor ekonomi unggulan berbasis IT dan pemanfaatan inovasi							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik	
Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Pengembangan smart governance dan peningkatan profesionalisme SDM ASN	1	1				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan		
	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pelayanan Publik Cerdas	
	Peningkatan kualitas ASN yang lebih produktif berbasis kompetensi dan kompensasi kinerja yang berkeadilan							Program Kepegawaian Daerah	Program ASN Kukar Terbaik	
	Peningkatan pendidikan dan penguatan wawasan demokrasi wilayah	Pembangunan pondasi demokrasi substansial dan peningkatan stabilitas ekonomi			1	1		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
	Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan	Pengembangan dasar sinergisitas dan kesinambungan pembangunan					1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah dan aksesibilitas pelayanan publik	Penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah	1	1	1			Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Internet Desa Gratis	
	Pemerataan pembangunan yang integratif sebagai penyangga IKN							Program Perekonomian dan Pembangunan		

Misi	Arah Kebijakan	Strategi	Tema RPJPD Tahap I					Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Proyek Strategis 1	Proyek Strategis 2
			Tema Tahun 2026	Tema Tahun 2027	Tema Tahun 2028	Tema Tahun 2029	Tema Tahun 2030			
			Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan	Akselerasi Pembangunan SDM dan Peningkatan Efektivitas Perlindungan Sosial	Pengembangan Ekonomi Sektor Unggulan Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata	Pemantapan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pendapatan Masyarakat Berkualitas	Perwujudan Kukar yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan			
berkeadilan	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan dan pemerataan kualitas infrastruktur di perdesaan dan pemenuhan rumah layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum memadai				1	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik	
	Penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta kawasan permukiman dengan							Program Kawasan Permukiman	Program Permukiman Idaman Terbaik	
Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan	Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	1	1	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Program Etam Sejahtera
	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan							Program Pengelolaan Pendidikan	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik
	Penguatan perlindungan sosial berbasis pemanfaatan data perlindungan sosial yang berkualitas							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Program Etam Sejahtera
	Peningkatan produktivitas angkatan kerja berbasis keterampilan dan keahlian	Peningkatan tenaga kerja yang adaptif, produktif dan inovatif				1	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal	Penguatan nilai-nilai keagamaan serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini	Pengembangan pendidikan karakter dalam menguatkan identitas budaya masyarakat	1	1	1			Program Pengembangan Kebudayaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Program RT Ku-Terbaik	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku
	Peningkatan ketahanan keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif							Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program RT Ku-Terbaik	
	Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan alam	Pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal serta pengembangan resiliensi kebencaan				1	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Jaga Lingkungan Lestari	
	Peningkatan kapasitas tanggap bencana masyarakat							Program Penanggulangan Bencana		

Analisis Data Pendukung	Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Visi	Pokok Visi	Fokus	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
Pertumbuhan Ekonomi di Kutai Kartanegara pada tahun 2023 berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non-ekstraktif	**Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**	Maju	Ekonomi	Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan NTB Ekonomi Non Ekstraktif	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi yang sehat	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
							Kontribusi PDRB Kab. Kukar Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur*			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
							PDRB per Kapita*			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
										Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan pengusaha UMKM yang naik kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
										Meningkatnya daya saing kepemudaan dalam pembangunan perekonomian	Rasio Wirausaha Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
										Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
									Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB*	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Pertumbuhan jumlah proyek penanaman modal daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
										Meningkatnya kerjasama pembangunan perekonomian daerah berbasis kawasan	Persentase kerjasama yang mendukung perekonomian daerah berbasis kawasan	Program Perekonomian dan Pembangunan
								Meningkatnya produksi pangan berbasis diversifikasi pertanian berkualitas	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian dan perkebunan rakyat	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
											Pertumbuhan Produksi Perkebunan	
Indeks Reformasi Birokrasi Kukar mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 60,12 dimana sebelumnya sempat mencapai 62,74. Angka ini sangat jauh di bawah capaian IRB Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 73,87.	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi			Tata Kelola	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan demokrasi substansial dan stabilitas kondusivitas wilayah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik**	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
									Indeks SPBE	Meningkatnya kualitas layanan dan penggunaan akses internet internal pemerintahan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	
										Meningkainya etika dan budaya politik	Persentase Keikutsertaan Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Pencapaian Nilai SAKIP juga belum optimal dengan capaian 67,86 (kategori B) pada tahun 2023							Indeks Daya Saing Daerah*	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
										Meningkatnya tata kelola anggaran	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
										Meningkatnya tata kelola akuntansi dan peleporan	Persentase penurunan temuan BPK	
										Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
									Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentese ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah

Analisis Data Pendukung	Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Visi	Pokok Visi	Fokus	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
										Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan	
								Menurunnya tingkat korupsi dan temuan mal administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah	Indeks Integritas Pemerint	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
										Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
Belum seluruh masyarakat merasakan hasil pembangunan karena masih ada masyarakat yang belum	Belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal			Infrastruktur	Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Desa Membangun/Indeks Desa	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan menggunakan potensi sumber daya dan kearifan lokal	Persentase peningkatan Desa Mandiri	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Tingkat kemantapan jalan juga baru sebesar 65,50% yang mengindikasikan masih banyaknya jalan dengan							Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB**	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan	Tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
										Meningkatnya integrasi pembangunan berbasis konektivitas wilayah	Pertumbuhan panjang jalan Negara dan Provinsi	Program Perekonomian dan Pembangunan
Selain itu, rumahtangga pengguna air bersih hanya sebesar 82,18% dan rumahtangga bersanitasi sebesar								Meningkatnya akses dan cakupan masyarakat terhadap hunian layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang	Program Kawasan Permukiman
										Meningkatnya akses informasi dan komunikasi masyarakat berbasis internet	Persentase rumahtangga yang memiliki akses internet	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
IPM Kukar berada di peringkat kelima dari 10 kab/kota di Kalimantan Timur. Selain itu, capaian 76,57 pada tahun 2024 juga menjadikan capaian IPM Kukar berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur (78,79)	Belum optimalnya pembangunan SDM yang merata	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas		Sejahtera	SDM dan Budaya	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia*	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
									Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi**		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	
								Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
											Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	
Nilai IPK Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional, yaitu pada angka 49,08. Nilai ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 53,23	Belum optimalnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya dalam upaya menuju masyarakat berkebudayaan maju	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya						Meningkatnya masyarakat yang harmonis dan berbudaya dalam keberagaman	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
										Meningkatnya kualitas masyarakat dalam membaca Al-	Persentase penduduk yang dapat membaca Al-Qur'an	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
								Meningkatnya ketahanan keluarga berbasis karakter dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga**	Meningkatnya kualitas keluarga dalam pembangunan	Persentase keluarga sejahtera	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
									Indeks Ketimpangan Gender**	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
								Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**	Meningkatnya angkatan kerja yang kompeten dan produktif	Tingkat Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat kemiskinan di Kutai Kartanegara	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan					Tingkat Kemiskinan*	Meningkatnya pendapatan per kapita	Rasio Gini*	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Analisis Data Pendukung	Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Visi	Pokok Visi	Fokus	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
berada diatas angka provinsi Kaltim dan angka Nasional	dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	kemiskinan kultural						yang merata dan berkualitas	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	masyarakat rentan		
									Tingkat Keparahan Kemiskinan			
								Meningkatkan ketahanan pangan wilayah	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Terjadi penurunan signifikan pada Indeks Kualitas Air yang	Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi dan resiliensi bencana daerah	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana		Berkelanjutan	Lingkungan Hidup	Meningkatnya penjagaan kelestarian lingkungan hidup dan tanggap bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK*	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pertumbuhan Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Dominasi sektor pertambangan dan penggalian masih sangat tinggi yang merupakan perekonomian tak											Pertumbuhan Indeks Kualitas Lahan	
BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengidentifikasi 12 jenis ancaman bencana. Jenis bencana alam yang diidentifikasi meliputi banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrem, epidemi atau wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi,							Indeks Risiko Bencana**	Meningkatnya kondisi tanggap dan penanggulangan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsigaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyerahan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana

Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Urusan	Penanggung Jawab OPD
Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan NTB Ekonomi Non Ekstraktif	**Meningkatkan riset dan inovasi daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan pembangunan**	**Indeks Inovasi Daerah****	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Kontribusi PDRB Kab. Kukar Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur*			Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Persentase Implementasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah		
		PDRB per Kapita*			**Meningkatkan pengembangan potensi dan daya tarik wisata**	**Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata**	Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Meningkatnya nilai tambah fasilitas penduduk sektor pariwisata	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB**		
					Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara**		
					Meningkatnya kapasitas perdagangan dan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang tumbuh dan stabil	**Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)****	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Meningkatnya pengendalian harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat	Disparitas Harga**		
						Indeks Perkembangan Harga (indeks)**		
				Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB*	**Meningkatnya kapasitas perdagangan dan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang tumbuh dan stabil**	**Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan**	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Meningkatnya aktivitas ekonomi industri kecil dan menengah	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota		
					Meningkatkan kinerja koperasi dalam mendukung perkembangan UMKM	**Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap PDRDB**	Koperasi & UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
					Meningkatnya kualitas usaha mikro	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas**		
					Meningkatnya kewirausahaan daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah**		
					Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB**		
			Meningkatnya produksi pangan berbasis diversifikasi pertanian berkualitas	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	**Meningkatkan daya saing sektor pertanian daerah**	**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**	Pertanian	Dinas Pertanian
					Meningkatnya produksi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura		
					Meningkatnya produksi sub sektor peternakan	Produksi Sub Sektor Peternakan		
					Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun		
					Meningkatkan daya saing sektor perkebunan	**Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB**		Dinas Perkebunan
					Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan		
					Meningkatnya produktivitas perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan		
					Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan	**Pertumbuhan Produksi Perikanan**	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Meningkatnya produksi komoditas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan		
					Meningkatkan kualitas ekosistem pada Tahura	**Pemulihan Ekosistem Pada Tahura**	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Urusan	Penanggung Jawab OPD
					Meningkatnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem lingkungan	Indeks Keanekaragaman hayati		
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan demokrasi substansial dan stabilitas kondusivitas wilayah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik**	**Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan anggota DPRD**	**Indeks Efektivitas Koordinasi dan Komunikasi**	Pendukung Urusan Pemerintahan (Set DPRD)	Sekretariat DPRD
		Indeks Daya Saing Daerah*			Meningkatnya kualitas layanan terhadap anggota DPRD	Indeks Kepuasan layanan fasilitasi kegiatan DPRD		
					Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi yang sesuai peraturan berlaku	**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Meningkatnya layanan kepengurusan dokumen kependudukan	Indeks Kelengkapan dan Akurasi Data Penduduk		
						Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat		
					Meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara	**Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)**	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
					Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan realisasi investasi sektor non ekstratktif		
					Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Kepuasan Layanan Investasi		
					Meningkatkan kualitas administrasi pertanahan dan perlindungan terhadap kawasan lindung daerah	**Indeks Pelaksanaan Reforma Agraria**	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
					Meningkatnya efektivitas penggunaan tanah negara/pemda	Persentase Tanah Negara/Pemda yang terpakai untuk kepentingan publik		
					Meningkatnya kualitas ketertiban kepemilikan sertifikasi tanah	Persentase Penerbitan Sertifikasi Tanah kepada masyarakat yang belum memiliki/hanya menguasai tanah dalam bentuk sewa atau penggarapan		
					Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan	**Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan**	Kewilayahan	20 Kecamatan
					Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP		
						Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik		Kecamatan Yang Mengkoordinasikan Desa
						Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan		Kecamatan Yang Membawahi Kelurahan
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**Meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan**	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)****	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan berbasis IT	Indeks Domain Tata Kelola SPBE		
						Indeks Domain Layanan SPBE		
						Indeks Domain Manajemen SPBE		

Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Urusan	Penanggung Jawab OPD
						Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE		
					Meningkatnya akses telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir**		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien**	**Indeks Kualitas Pembangunan Daerah**	Pendukung Urusan Pemerintahan (Setda)	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya layanan administratif pemerintahan	Efektivitas dan Efisiensi Layanan Administratif		
					Meningkatnya kinerja Standar Pelayanan Minimal	Rata-rata capaian SPM		
					Meningkatnya capaian kinerja dan tugas pembantuan pemerintah daerah	Nilai LPPD		
					Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	**Rata-Rata Pencapaian Sasaran RPJMD**	Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Meningkatnya akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah	Penilaian KInerja Perencanaan (Komponen SAKIP)		
					Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan (Komponen IPKD)		
					Meningkatnya efektivitas penggunaan keuangan daerah	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Anggaran (Komponen IPKD)		
					Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset (Komponen IPKD)		
					Meningkatkan kemandirian pembangunan daerah	**Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)****		Badan Pendapatan Daerah
					Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah	KInerja Pengelolaan Pendapatan (Komponen IPKD)		
					Meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan	**Indeks Kualitas Data Sektoral**	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi pembangunan	Indeks Ketersediaan dan Penyebaran Data		
					Meningkatkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan	**Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Menurunnya kebocoran data penting pemerintah	Jumlah Kasus Kebocoran Data		
					Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan kualitas tata kelola pengarsipan daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Meningkatnya ketersediaan arsip yang akuntabel	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja		
				Indeks Profesionalitas ASN	**Meningkatkan penyelenggaran negara yang profesional dan bertanggungjawab**	**Indeks Profesionalitas ASN**	Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan objektif	Indeks Kompetensi (Komponen IP-ASN)		
						Indeks Kinerja (Komponen IP-ASN)		

Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Urusan	Penanggung Jawab OPD
					Meningkatnya kompetensi dan keahlian ASN Pemerintah Daerah	Indeks Pengembangan Diri dan Pembelajaran Berkelanjutan (Komponen IP-ASN)	Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)	
			Menurunnya tingkat korupsi dan temuan mal administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah	Indeks Integritas Pemerintah**	**Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan**	**Indeks SPIP (tiga komponen SPIP)**	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Kabupaten
					Meningkatnya kematangan pengendalian intern pemerintahan	Maturitas SPIP Pemda		
					Meningkatnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penganggaran	Manajemen Risiko Indeks (MRI)		
					Meningkatnya pengendalian korupsi pada lingkup pemerintah daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		
					Meningkatkan pelayanan publik kesatuan bangsa dan politik daerah	**Indeks Pelayanan Publik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)**	Pendukung Urusan Pemerintahan Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatnya wawasan demokrasi masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi		
					Meningkatnya keamanan dan kondusivitas wilayah	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud		
					Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Trantibum (Satpol PP)**	Pendukung Urusan Pemerintahan Trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja
					Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Laju penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
					Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Tingkat penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		
	Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya pemerataan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Desa Membangun/Indeks Desa	**Meningkatkan kemajuan desa yang berkualitas**	**Persentase Desa Mandiri (%)****	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB**			Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan		
					Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi	**Persentase Desa Mandiri di kawasan Transmigrasi**	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Meningkatnya kualitas transmigran dan program transmigrasi	Indeks Transmigrasi		
			Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	**Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah**	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum**	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum
					Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur bina marga	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Bina Marga		
					Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur sumber daya air	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Sumber Daya Air		
					Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur keciptakaryaan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Keciptakaryaan		
					Meningkatkan layanan infrastruktur perhubungan	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan**	Perhubungan	Dinas Perhubungan

Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Urusan	Penanggung Jawab OPD
					Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas kabupaten/kota		
					Meningkatnya kinerja lalu lintas daerah	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		
			Meningkatnya akses dan cakupan masyarakat terhadap hunian layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**	**Meningkatkan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman**	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perumahan dan Kawasan Permukiman**	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah layak huni		
					Meningkatnya pemerataan layanan air minum layak	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan**		
					Meningkatnya kondisi sanitasi layak	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak**		
					Meningkatnya kapasitas air baku	Kapasitas Air Baku**		
					Meningkatkan kualitas administrasi pertanahan dan perlindungan terhadap kawasan lindung daerah	**Persentase Kawasan Lindung Terlindungi**	Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
					Meningkatnya kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana penataan ruang	Persentase Kesesuaian Penggunaan Lahan		
	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia*	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	**Meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas dan berbudaya**	**Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)****	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat Kemiskinan*		Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi**		**Harapan Lama Sekolah (tahun)****		
					Meningkatnya kemampuan literasi membaca dan numerasi masyarakat	Literasi Membaca SD/Sederajat**		
						Literasi Membaca SMP/Sederajat**		
						Numerasi SD/Sederajat**		
						Numerasi SMP/Sederajat**		
					Menurunnya angka putus sekolah	Angka Putus Sekolah SD		
						Angka Putus Sekolah SMP		
					Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan dan kualitas tata kelola pengarsipan daerah	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM).**	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Meningkatnya kesadaran literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	**Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif**	**Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)****	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Meningkatnya kesehatan keluarga	Indeks Keluarga Sehat		
					Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, khususnya ibu dan anak	Angka Kematian Ibu		
						Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**		
			Meningkatnya masyarakat yang harmonis dan berbudaya dalam keberagaman	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas dan berbudaya**	**Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan**	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Meningkatnya upaya pelestarian warisan seni, budaya dan adat istiadat	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran		

Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Urusan	Penanggung Jawab OPD
						Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan		
			Meningkatnya ketahanan keluarga berbasis karakter dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga**	**Terkendalinya pertumbuhan penduduk**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya perencanaan kelahiran anak	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		
					Meningkatkan aktivitas positif kepemudaan dan prestasi olahraga	**Indeks Kepemudaan dan Olahraga (Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Olahraga dan Indeks Partisipasi Pramuka)**	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Meningkatnya pembangunan kepemudaan daerah	Indeks Pembangunan Pemuda		
					Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Indeks Pembangunan Olahraga		
					Meningkatnya partisipasi kaum muda dalam mengikuti aktivitas kepramukaan	Indeks Partisipasi Pramuka		
				Indeks Ketimpangan Gender**	**Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam aktivitas pembangunan**	**Indeks Pemberdayaan Gender**	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Menurunnya kekerasan dalam rumah tangga	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)		
						Rasio Kekerasan Terhadap Anak (per 10.000 anak)		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**	**Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi**	**Tingkat Kesempatan Kerja**	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal		
					Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi**		
			Meningkatnya pendapatan per kapita yang merata dan berkualitas	Rasio Gini*	**Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial**	**Rata-rata persentase penurunan PMKS per tahun**	Sosial	Dinas Sosial
				Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Meningkatnya keberfungsian sosial masyarakat	Keberfungsian Sosial		
				Tingkat Keparahan Kemiskinan				
			Meningkatkan ketahanan pangan wilayah	Indeks Ketahanan Pangan	**Meningkatkan ketersediaan pangan dengan gizi seimbang**	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
					Menurunnya kerawanan pangan daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)**		
					Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)		
	Meningkatnya penjagaan kelestarian lingkungan hidup dan tanggap bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK*	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	**Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup***	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks Risiko Bencana**			**Meningkatkan pengelolaan sumber daya air, udara dan tutupan lahan yang berkualitas**	**Indeks Kualitas Air (IKA)**		
						Indeks Kualitas Udara (IKU)		
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		
			Meningkatnya kondisi tanggap dan penanggulangan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	**Meningkatkan kapasitas tangguh bencana daerah**	**Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Bencana**	Pendukung Urusan Pemerintahan Trantibum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Urusan	Penanggung Jawab OPD
					Meningkatnya layanan pencegahan dan perlindungan korban bencana alam	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
					Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	**Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Kebakaran**		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Meningkatnya waktu tanggap penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		

NB:
***Indikator Sasaran Visi**
****Indikator Utama Pembangunan**
IUP yang dapat digunakan untuk indikator program dan kegiatan (IUP yang belum digunakan)
Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)
Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (%)
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (orang)
Return on Asset (ROA) BUMD (%)
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*
Total Kredit/PDRB (%)
Tingkat Kriminalitas (Crime rate)
Jumlah kejadian tindak criminal (kasus)
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Jumlah kejadian konflik SARA